

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa pemerintah Arab Saudi mengubah kebijakannya tentang peran perempuan di ranah publik dengan menggunakan studi kasus pernyataan *Royal Decree No. M/85* tentang aturan berlalu lintas bagi perempuan di tahun 2017 dan secara resmi menerapkannya pada 24 Juni 2018. Hal ini menjadi problematik karena Arab Saudi merupakan negara yang sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada perempuan untuk mengemudi. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat Arab Saudi sangat erat dengan budaya Patriarki yang mengonstruksi pemikiran tentang pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Melihat fakta demikian, diperlukan penjelasan secara menyeluruh untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah Saudi dalam situasi saat ini. Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang menodong keputusan tersebut dibuat dengan menggunakan pendekatan feminisme liberal dan menganalisa hubungan antar faktor menggunakan teori strukturisasi. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa perubahan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh Putera Mahkota Mohammed bin Salman, selaku *de facto ruler* di Arab Saudi dengan Visi 2030 sebagai padangan politiknya, peran anggota parlemen perempuan pada Dewan Shura, tekanan dari aktivis perempuan sebagai agensi yang memiliki tujuan transformatif untuk merubah status quo dan tekanan internasional berupa kecaman dari aktor-aktor internasional lainnya.

**Kata-kata Kunci :** *Royal Decree*, Visi 2030, Aktivis Perempuan, Feminisme Liberal, Agensi